

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun sebagai tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum APBD yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD. Perubahan PPAS antara lain mencerminkan perubahan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, Perubahan PPAS juga menggambarkan perubahan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Perubahan pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD).

Perubahan PPAS Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan secara bersamaan dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Perubahan PPAS Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai kerangka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran. Oleh karena itu, perubahan PPAS disusun untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam Perubahan PPAS Kabupaten Solok disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau; dan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Penyusunan Perubahan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok ke Kayuaro-Sukarami di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	Pendapatan Daerah	1.346.109.035.955,00	1.296.872.828.672,00	(49.236.207.283,00)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	139.987.754.098,00	142.369.021.199,00	2.381.267.101,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.641.912.570,00	65.641.912.570,00	(3.000.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00	56.973.267.865,00	4.722.242.074,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00	9.068.840.764,00	659.025.027,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00	10.685.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.206.121.281.857,00	1.154.503.807.473,00	(51.617.474.384,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.842.921.000,00	1.086.884.897.110,00	(86.958.023.890,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.278.360.857,00	67.618.910.363,00	35.340.549.506,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.346.109.035.955,00	1.296.872.828.672,00	(49.236.207.283,00)

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025

Pada tabel 2.1 diatas terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp49.236.207.283,00. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dan transparansi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Penganggaran pendapatan agar merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya; dan

5. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan.

Asumsi dasar kebijakan perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Tahun 2025, secara umum mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp49.236.207.283,00 dari target semula sebesar Rp1.346.109.035.955,00 menjadi Rp1.296.872.828.672,00.

2.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak daerah selanjutnya disebut dengan Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah dengan:

- 1) Peningkatan Basis Data Perpajakan;
- 2) Penilaian dan Penagihan serta pemeriksaan;
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 4) Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak; dan
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perpajakan

2.1.2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah yaitu dengan kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah dengan cara:

- a. Perluasan Basis Penerimaan;
- b. Perkuatan Proses Pemungutan;
- c. Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan;
- d. Peningkatan Penerimaan dengan perbaikan perencanaan.

2.1.3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil penyertaan modal daerah, hasil dari penyertaan modal tersebut berupa deviden atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD; dan
- e. Melakukan Koordinasi antara BUMD, perusahaan swasta dan Pemerintah Daerah.

2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain– lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan- lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD; dan
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

2.1.5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer ditetapkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

- Dana Transfer Umum.

Dana transfer Umum terdiri dari DBH dan DAU.

- Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK dan DAK Non Fisik.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

e) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Transfer Antar-Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.1.6. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan transfer. Lain lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan perubahan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan wajib dan mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar, Prioritas Pembangunan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam menentukan besaran belanja senantiasa mengacu atas pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan akan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian setiap dana yang digunakan dalam APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
5	Belanja	1.391.109.035.955,00	1.310.349.758.296,88	(80.759.277.658,12)
5.1	Belanja Operasi	1.072.233.418.528,49	1.028.139.226.087,60	(44.094.192.440,89)
5.1.01	Belanja Pegawai	703.809.595.208,92	688.718.643.169,02	(15.090.952.039,90)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.890.633.610,13	321.097.793.209,14	(29.792.840.400,99)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.533.189.709,44	18.322.789.709,44	789.600.000,00
5.2	Belanja Modal	146.497.927.616,51	116.632.567.565,28	(29.865.360.051,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.756.483.439,45	36.040.761.569,22	1.284.278.129,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.592.208.544,06	32.700.293.246,06	(5.891.915.298,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.169.636.210,00	43.711.546.227,00	(25.458.089.983,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.947.204.423,00	4.076.774.023,00	129.569.600,00
5.2.06	Aset lainnya	32.395.000,00	103.192.500,00	70.797.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.339.617.334,00	(3.435.382.666,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.339.617.334,00	(3.435.382.666,00)
5.4	Belanja Transfer	166.602.689.810,00	163.238.347.310,00	(3.364.342.500,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.766.753.810,00	7.766.753.810,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	158.835.936.000,00	155.471.593.500,00	(3.364.342.500,00)
	Jumlah Belanja	1.391.109.035.955,00	1.310.349.758.296,88	(80.759.277.658,12)

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan, maka prioritas pembangunan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.2
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025
ASTA CITA 4

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat unggul dan berdaya saing	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas			223,060,696,310	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	98,75 %	81.681.983.008,31	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum Sekolah	90%	36.500.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat	11 Sekolah	3.150.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	100%	16.125.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	30 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemerolehan Medali dalam event Olahraga Nasional maupun Internasional	7 Medali	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	50%	250.000.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	44,12 nilai	1.120.711.985,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4,440 Indeks	17.186.965,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	80 %	62.469.164,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	85 %	4.071.195,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	45 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,55 Indeks	4.880.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia sesuai standar	90%	2.343.905.864,29	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga	43,25%	563.586.300,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD	0,0140 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
							PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,00015 Rasio	391.644.420,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	4 Nagari	60.137.313,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	750 angka	83.396.089,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	100 %	298.835.946,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,45 %	524.193.788,90	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	75,45 %	3.374.921.349,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
							KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	100 %	1.628.169.999,80	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 3.3

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

ASTA CITA 2,3,5 DAN 6

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
2	1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan perdagangan dan industri Kecil menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata			35,295,805,453	
	2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mewujudkan kesejahteraan petani					
	3. Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTK	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih	0,22 %	217.004.977,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPDP	
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	12 %	53.813.231,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90 %	73.619.766,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Investasi dan Regulasi	100 %	59.867.025,00	PD PELAKSANA USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi	100 %	34.702.405,00	PD PELAKSANA USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin usaha yang diterbitkan tepat waktu	100 %	334.484.043,00	PD PELAKSANA USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib administrasi	50 %	63.067.177,00	PD PELAKSANA USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi	100 %	7.098.336,00	PD PELAKSANA USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Perkapita	657,4 kg/kap/thn	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	7 komoditi 40 % 87,0 Skor	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,46 %	109.698.209,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Masyarakat	10 Komoditi	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,6%	178.345.308,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9,30 %	989.528.941,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Nagari yang telah Menyusun Regulasi Penggunaan Alat Tangkap	4,05 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPDP	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	103100 Kg	194.864.129,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	5%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	5%	97.456.496,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	5%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	5%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	89,84 %	270.750.477,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPDP	
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)				USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	5%	815.030.481,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9%	301.506.404,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas	25,21 %	193.497.230,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Event yang diikuti	100%	75.531.612,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	26%	106.099.282,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5%	39.043.882,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang difasilitasi	8 %	833.888.234,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	100%	4.387.976,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia	100 %	71.100.877,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah lembaga adat yang difasilitasi	85 Kelompok	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan	5 %	629.712.105,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	15 Buah	52.654.506,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPDP	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan	25%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata terintegrasi	4 Paket	780.097.720,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	25 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Komoditi Pertanian	1,1 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.65 %	1.129.836.426,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Luas Serangan OPT	1,67%	406.148.377,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif	19%	4.417.005.647,00	PD PELAKSANA URUSAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
							PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			80,419,532,190	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	56,2 %	6.031.605.664,20	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	86,27 %	2.884.708.067,80	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	65 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	77,27 %	9.535.820.728,37	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
							UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung dan Lingkungan Pemerintah Berkondisi Baik	55 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	67,80 %	28.328.779.186,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	29,41 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	59 %	745.426.860,26	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni	100 %	610,200,000	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata	65 %	5.510.478.551,40	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	36,07 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah yang diselesaikan	100 %	71.965.115,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang diselesaikan	80 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Percil Tanah yang ditata	- %	113.630.607,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman ketertiban umum masyarakat yang tertangani	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPDP Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	98,98 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	100%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100%	454.354.674,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten	100%	99.528.950,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	80 %	78.572.681,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	100 %	81.448.472,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1,08 Rasio	497.620.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
							BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan penghasil Limbah B3 yang diawasi	100 %	2.118.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	50 %	30.161.022,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	47.208.900,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan dan penilaian calon sekolah Adiwiyata	100 %	2.810.500,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100%	2.412.000,00	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terangkut ke TPA	18.18%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	5 %	2.412.947.405,99	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan transportasi air	20 %	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Tabel 3.4

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

ASTA CITA 7

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
3	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			738.765.699.254	
			Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat			237,971,534,310	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun	100%	1,459,901,697	PD PELAKSANA BIDANG URUSAN PERENCANAAN
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terlaksana	100%	731,588,305	PD PELAKSANA BIDANG URUSAN PERENCANAAN
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penyusunan Kajian yang Difasilitasi	100%	291,890,070	PD PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	180,948,717,844	PD PELAKSANA URUSAN KEUANGAN

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	2,218,652,116	PD PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	6,56 %	3,302,702,394	PD PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	70%	3,768,660,000	PD PELAKSANA KEPEGAWAIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	10,118,006,337	PD PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	71 %	682,267,700	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang Tertangani	100 %	69,787,300	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan	14 %	64,879,200	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
				berdasarkan perjanjian kerjasama			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	14,755,400	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	79%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	78%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	59,795,350	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	35%	25,000,000	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	6,323,000,000	PD PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100%	3,118,000,000	PD PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100%	18,883,419,360	PD PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%	1,048,896,596	PD PELAKSANA INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pembinaan APIP terhadap Audity	100%	313,866,000	PD PELAKSANA INSPEKTORAT DAERAH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	100%	2,914,592,704	PD PELAKSANA KECAMATAN
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	145,931,857	PD PELAKSANA KECAMATAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	59,820,856	PD PELAKSANA KECAMATAN
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	100%	149,901,381	PD PELAKSANA KECAMATAN
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	508,683,422	PD PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik	100%	96,818,421	PD PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PN	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
				dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/ LSM Aktif	52,18 %	93,000,000	PD PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	54,000,000	PD PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial	100%	505,000,000	PD PELAKSANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 3.5

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

ASTA CITA 8

PN	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025/Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target dan Plafon Anggaran Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Pagu RKPD	
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan Adat Basandi Syara' syara' Basandi Kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan ABS-SBK			2,750,060,000	
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	12,5 %	180,000,000	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	57%	0	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	3,7 indeks	1,239,150,000	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	100 %	1,330,910,000	PD PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan mencakup program dan kegiatan yang dihapus, program dan kegiatan yang baru, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2025.

Penyusunan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah). Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 kebijakan belanja diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2025.

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sumber penerimaan pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok menganggarkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) untuk penerimaan pembiayaan dalam hal APBD diperkirakan defisit.

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Solok direncanakan berupa penyertaan modal daerah.

Adapun Perubahan target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
6	PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : RKPD Perubahan Pemerintah Daerah kabupaten Solok Tahun 2025

BAB VI
PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Kabupatenn Solok menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Solok, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan terhadap program/kegiatan dan pagu anggaran definitif yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS yang dilakukan pada saat proses pembahasan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disepakati sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dengan harapan dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga program/kegiatan yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

BUPATI SOLOK,

JON FIRMAN PANDU, SH

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	